

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama bagi pemerintah dan beberapa negara yang ada di dunia. Kuatnya pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan kuat apabila memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat terealisasi oleh beberapa faktor pembentuk perekonomian, seperti investasi atau penanaman modal, teknologi, sumber daya manusia, sumber daya alam, efisiensi, dan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS), laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis hingga mencapai -2,07%, lalu pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali bangkit bahkan mencapai angka 5,31% di mana angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014 yang hanya mencapai 5,21%. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan apabila seluruh faktor-faktor pendukungnya dapat dioptimalkan, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Namun pada kenyataannya sumber daya manusia di Indonesia masih belum diberdayakan

secara maksimal, di mana seharusnya angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, di mana perempuan pada tahun 2022 hanya menyumbang sekitar 53,41% dan laki-laki jauh berada pada angka 83,87%. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dapat memperkuat adanya ketimpangan gender dalam berbagai dimensi baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Asean Development Bank* (2016), apabila ketimpangan gender dihilangkan dengan maksimal, maka pendapatan agregat akan meningkat sebesar 6,6% dan 14,5% dari kondisi awal setelah satu atau dua generasi. Dengan hilangnya ketimpangan gender maka potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara penuh, sehingga output yang dihasilkan akan meningkat. Oleh karena itu beberapa organisasi, lembaga, bahkan negara banyak yang berusaha untuk mengurangi ketimpangan gender dengan menggunakan kebijakan, hukum, dan program-program yang dapat mendukung kesetaraan gender.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2016) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati pada pertemuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2015, setidaknya terdapat 16 *goals* dan 91 target yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan serta anak perempuan. Beberapa diantara *goals*

tersebut yaitu: (SDGs 3) Kesehatan dan Kesejahteraan, memastikan bahwa semua orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dengan layanan kesehatan yang berkualitas dan mendapatkan manfaat yang sama dari upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. (SDGs 4) Pendidikan Berkualitas, memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan berkualitas. Ini termasuk penghapusan hambatan seperti pernikahan anak perempuan, kekerasan berbasis gender, dan ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan. (SDGs 5) Kesetaraan Gender, *goals* ini secara khusus menargetkan pencapaian kesetaraan gender dalam berbagai bidang, termasuk dalam hukum, kepemimpinan, partisipasi politik, dan ekonomi. (SDGs 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, tujuannya yaitu untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan memberikan kesempatan kerja dan upah yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi gender, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

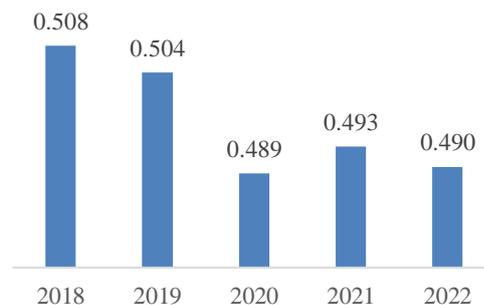
Dalam upaya mencapai kesetaraan gender, pemerintah Indonesia bahkan mengeluarkan peraturan mengenai isu gender dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Adanya peraturan tersebut menjadikan kesetaraan gender tidak hanya berupa prinsip moral yang penting saja, tetapi juga merupakan komponen penting dalam membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan damai bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Tabel 1. 1 *The Global Gender Gap Index 2023 Rankings*

Negara	Ranking Global	Skor
Filipina	16	0,791
Singapura	49	0,739
Laos	54	0,733
Vietnam	72	0,711
Thailand	74	0,711
Indonesia	87	0,697
Kamboja	92	0,695
Timor Leste	95	0,693
Brunei Darussalam	96	0,693
Malaysia	102	0,682
Myanmar	123	0,650

Sumber: World Economic Forum (data diolah)

Berdasarkan *The global gender gap index*, pada tahun 2023 indeks ketimpangan gender negara Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara dengan skor 0,697, artinya ketimpangan gender Indonesia baru tertutup sekitar 69,7%. Indonesia bahkan berada pada peringkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain seperti Filipina (16), Singapura (49), Laos (54), Vietnam (72), dan Thailand (74).



Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Gambar 1. 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Barat 2018-2022

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang masih memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang tinggi. Meskipun berdasarkan grafik IKG di atas menunjukkan provinsi Jawa Barat

setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan, yang berarti ketimpangan gender semakin membaik atau berkurang (Badan Pusat Statistika, 2023).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), *Gender Inequality Index* (GII) merupakan ukuran untuk ketimpangan gender. Tiga aspek utama yang digunakan dalam mengukur ketimpangan gender yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan angkatan kerja. Sedangkan *World Economic Forum* (WEF) menggunakan *Global Gender Gap Index* (GGGI) dengan kriteria ruang lingkup ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan untuk mendapatkan besarnya kesenjangan gender. Indonesia menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam menghitung indikator statistik gender. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) komponen yang digunakan dalam menyusun IPG terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan ekonomi.

Indikator yang digunakan dalam aspek kesehatan yaitu angka harapan hidup. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2019) perempuan biasanya memiliki umur yang lebih panjang dari laki-laki, karena dari segi gaya hidup laki-laki biasanya memiliki kebiasaan yang buruk seperti merokok, mudah stres, dan sering melakukan pekerjaan yang berat. Namun meskipun perempuan memiliki harapan hidup yang panjang, tetapi karakteristik fisik perempuan secara umum lebih lemah dari laki-laki sehingga mengakibatkan perempuan lebih rentan terhadap penyakit. Dalam aspek kesehatan, ketimpangan gender akan berakibat pada terhambatnya produktivitas tenaga kerja sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roslinda dkk. (2022) ketimpangan gender dalam kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, hal tersebut menjadi penyebab dari adanya ketimpangan gender dalam bidang kesehatan.

Dalam aspek pendidikan indikator yang digunakan yaitu rata-rata lama sekolah. Adanya stereotip yang berkembang dimasyarakat mengenai tugas perempuan yaitu sebagai istri yang mengurus rumah tangga, menyebabkan pendidikan tinggi bagi perempuan dianggap kurang penting. Ketimpangan gender dalam aspek pendidikan, menjadi akibat dari kurangnya kontribusi perempuan pada kegiatan ekonomi karena adanya kesenjangan pada peluang kerja. Orang yang memiliki pendidikan tinggi biasanya akan lebih mudah memasuki sektor pekerjaan yang berkembang dan memiliki kompensasi tinggi jika dibandingkan dengan orang yang dengan pendidikan rendah. Klasen dan Lamanna (2008) menyatakan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan dan lapangan kerja secara signifikan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi, karena ketimpangan gender dapat mengurangi sumber daya manusia.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator dalam ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki, hal ini dikarenakan biasanya laki-laki ketika memasuki usia kerja maka akan langsung bekerja karena memiliki tuntutan untuk memberikan nafkah pada keluarga. Ketimpangan gender pada peluang kerja dapat berakibat pada kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Di mana biasanya meskipun laki-laki dan perempuan memiliki

pengalaman dan kualifikasi yang sama, perempuan cenderung mendapatkan penghasilan yang lebih rendah karena adanya ketidaksetaraan dalam mengakses peluang karir atau diskriminasi upah.

Indikator yang digunakan dalam pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran per kapita. Tingginya tingkat produktivitas pada lapangan usaha laki-laki menyebabkan laki-laki memiliki penghasilan yang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perempuan. Kesenjangan dalam penghasilan tersebut akan berdampak pada tingkat pengeluaran konsumsi inter antara laki-laki dan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019). Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila pengeluaran konsumsi per kapita yang tinggi lebih di dominasi oleh golongan kecil.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ketimpangan Gender dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Pengeluaran Konsumsi serta Pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Pengeluaran

Per Kapita secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana pengaruh Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Pengeluaran Per Kapita secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana elastisitas PDRB terhadap Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Pengeluaran Per Kapita?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Pengeluaran Per Kapita secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh Rasio Angka Harapan, Rasio Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Pengeluaran Per Kapita secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui elastisitas PDRB terhadap Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Pengeluaran Per Kapita.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Universitas Siliwangi

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi maupun bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait pengaruh ketimpangan gender terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat keputusan dalam menentukan kebijakan yang terbaik mengenai ketimpangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan ekonomi di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Barat terkait hubungannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan mengakses *website* resmi seperti Badan Pusat Statistika (BPS), *World Economic Forum*, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta menggunakan jurnal-jurnal relevan yang didapat dari internet.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat bertujuan agar penelitian ini dapat diselesaikan dengan matriks jadwal yang sudah dibuat oleh penulis. Rincian matriks yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

Uraian Pelaksanaan	2023/2024								
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pengajuan Judul									
Penyusunan Proposal Penelitian									
Pengajuan Proposal Penelitian									
Sidang Proposal Penelitian									
Revisi Proposal Penelitian									
Pengumpulan dan Pengolahan Data									
Proses Bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi									
Sidang Skripsi									